

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak akhir abad ke-20, manusia menghadapi berbagai masalah ekologi dan isu pembangunan berkelanjutan. Isu-isu tersebut telah menjadi topik hangat yang mendorong pembangunan berkelanjutan sebagai model baru pembangunan dan menjadi tren pembangunan sosial di banyak negara (Linda, 2016). Kesejahteraan dan kehidupan yang layak merupakan tujuan dalam pembangunan di setiap negara agar mencapai keadaan yang aman, damai, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat.

Upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada pemenuhan hak dasar manusia, pada KTT PBB yang berlangsung September 2000 melahirkan deklarasi Milenium Development Goals (MDGs) yang berlaku 2000-2015 dan guna mencapai pembangunan global yang berkelanjutan maka dilanjutkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan beberapa lembaga internasional, sedangkan SDGs dibuat melalui negosiasi internasional yang terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah (Sembiring, 2016). SDGs merupakan sebuah dokumen yang digunakan sebagai acuan kerangka pembangunan global untuk mencapai target pembangunan pada 2030 yang diresmikan dalam sidang umum PBB pada 25 September 2015. Sidang diahdiri 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk

Indonesia (Mickael, 2015). SDGs memiliki 17 tujuan. Salah satu tujuan SDGs adalah mengenai kota dan komunitas berkelanjutan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia dewasa ini terus berbenah dalam memperbaiki sistem penataan kota guna membuat kota menjadi aman dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa permasalahan klasik yang dialami diantaranya kemacetan, banjir, dan salah satunya mengenai isu kritis mengenai pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak menjadi sesuatu yang penting untuk dipenuhi karena karakter dan kualitas pembangunan suatu Bangsa dan Negara sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk itu, DKI Jakarta harus mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya poin 11 yaitu menjadikan DKI Jakarta kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, membutuhkan perlindungan. Seorang anak harus dapat menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Hal ini sebanding dengan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi. Anak-anak adalah kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan masa depan. Pada kenyataannya, ada banyak variabel yang mempengaruhi hal itu salah satunya adalah faktor sosial dan

ekonomi. Karena kedua faktor tersebut, anak seringkali tidak memperoleh haknya sendiri karena dianggap lemah.

Anak-anak yang dianggap lemah tersebut sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Jumlah kasus anak yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta Utara yang Ditangani P2TP2A DKI Jakarta

No	Tahun	Jumlah		Persentase
		DKI Jakarta	Jakarta Utara	
1	2019	1.179	355	30,11
2	2020	947	420	44,35
3	2021	1.313	385	29,32
4	2022	1.278	455	27,05
5	2023	1.682	485	28,83
Jumlah		6.399	2100	32,81

Sumber : DPPAPP DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 hingga 2023 jumlah kasus kekerasan anak mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan di Jakarta Utara masih sering menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi anak, perdagangan anak, penganiayaan anak, pelibatan anak dalam gerakan massa, dan penggunaan anak untuk distribusi narkoba adalah beberapa kasus yang dihadapi anak-anak. Hak-hak anak jelas tidak ditegakkan, seperti yang terlihat dari masih adanya kekerasan terhadap mereka.

Kurangnya area publik yang ramah anak, anak-anak sering kali tidak dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, terutama di ibu kota. Ketiadaan fasilitas bermain yang layak di DKI Jakarta merupakan salah satu

tantangan utama. PBB melalui Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak anak, termasuk menyediakan fasilitas yang membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk kali pertama dibangun di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, sebagai proyek percontohan yang mengintegrasikan fasilitas fisik dan non-fisik untuk memenuhi hak-hak anak dan menjadikan kelurahan tersebut sebagai model kelurahan ramah anak. Tabel berikut menunjukkan jumlah orang yang tinggal di Jakarta Utara dalam rentang usia 0 hingga 17 tahun :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia Anak 0-19 Tahun di Kota Administratif Jakarta Utara Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0-4	73.102	69.515	142.617	25,55
5-9	71.860	67.700	139.560	25
10-14	70.466	66.883	137.349	24,61
15-19	70.519	68.057	138.576	24,82
Jakarta Utara	905.575	887.975	1.793.550	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara, 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat prihatin dengan tingginya jumlah anak di Kota Administrasi Jakarta Utara, terutama mengingat kurangnya ruang bermain yang ramah anak. Hal ini membuat pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang yang sehat menjadi lebih sulit, yang dapat berujung pada kekerasan dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya

permasalahan tersebut, tentunya Provinsi DKI Jakarta belum dapat mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan pada anak dan berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadikan hak-hak anak tidak terpenuhi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghadirkan ruang ketiga bagi masyarakat dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di berbagai wilayah ibu kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan tujuan mewujudkan tertib sarana dan prasarana serta kepastian pengelolaan RPTRA, mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap hak anak, mewujudkan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memenuhi hak anak dengan menyediakan ruang publik ramah anak dan ruang terbuka hijau sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Tabel 1.3 Kelompok Sasaran Utama Program RPTRA

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Anak-anak	12.500	27.8%
Remaja	7200	16%
Perempuan Dewasa	15.000	33.3%
Lansia	4.800	10.6%
Keluarga Sasaran RPTRA	10.500	23.3%
Total Penduduk	45.000	100%

Sumber : BPS Jakarta Utara Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kelurahan Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara, memiliki populasi sekitar 45.000 jiwa, dengan komposisi demografi yang menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap fasilitas dan program di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan data BPS Jakarta Utara tahun 2023, anak-anak mencapai 27,8% (12.500 jiwa) dan remaja 16% (7.200 jiwa), yang menegaskan pentingnya fasilitas bermain, edukasi, dan pengembangan keterampilan di RPTRA. Selain itu, perempuan dewasa yang berjumlah 33,3% (15.000 jiwa) membutuhkan program pemberdayaan, keterampilan, serta kegiatan sosial, sementara lansia 10,6% (4.800 jiwa) memerlukan layanan kesehatan dan interaksi sosial yang memadai. Dengan 10.500 keluarga sebagai kelompok sasaran utama RPTRA, program yang disediakan harus inklusif dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok usia. Oleh karena itu, RPTRA diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang memadai dan program yang tepat sasaran.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) terbuka untuk umum dan dibangun di tengah permukiman warga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh warga sekitar. Fasilitas-fasilitas dalam RPTRA tidak hanya ramah anak, namun juga ramah penyandang disabilitas. Selain itu, RPTRA juga dilengkapi dengan pengawasan CCTV (closed circuit television) yang membuat area ini memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga orangtua tidak perlu khawatir terhadap keamanan anaknya ketika belajar maupun bermain.

Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA melibatkan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemprov DKI telah mendirikan 324 RPTRA yang terdapat di 44 Kecamatan dan 173 Kelurahan. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Dari total RPTRA yang seluruhnya, sejumlah 253 unit RPTRA dibangun dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sejumlah 71 unit dibangun dengan menggunakan sumbangan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagai ruang yang ramah anak, RPTRA dikatakan ramah anak dibandingkan taman bermain biasa karena di dalam RPTRA terdapat berbagai fasilitas bermain yang terbuat dari bahan plastik dan metal khusus ramah anak dengan mengutamakan keamanan, seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, serta permainan lainnya. Selain fasilitas bermain, tersedia pula lapangan futsal dan badminton sebagai ruang berolahraga anak dan keluarga. RPTRA juga dilengkapi

dengan taman yang dihiasi berbagai tanaman dan pusat kompos yang mendaur ulang sampah. Dengan adanya taman di RPTRA ini, diharapkan warga dapat menikmati kesejukan ruang terbuka hijau dan mendorong anak untuk peduli lingkungan.

RPTRA tidak hanya menyediakan tempat bermain di luar ruangan, tapi juga disediakan tempat interaksi di dalam ruangan seperti perpustakaan dan ruang multimedia yang ditujukan sebagai tempat belajar anak. Terlebih lagi, RPTRA saat ini sudah dilengkapi oleh wifi dan fasilitas lain untuk umum seperti PKK Mart, ruang menyusui, toilet, serta ruangan serba guna. RPTRA juga dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan rapat, hajatan, pengajian, serta bakti sosial. Selain itu, dalam keadaan darurat, RPTRA dapat menjadi posko pengungsian bagi warga yang terkena dampak bencana, seperti banjir dan kebakaran.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017, RPTRA bertujuan untuk membangun kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; memenuhi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal; serta mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai. Studi ini akan berkonsentrasi pada inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam mendorong pengelolaan RPTRA yang efektif, kepedulian terhadap hak-hak anak, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Layanan anak yang harus disediakan di RPTRA diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 6 Nomor 123 Tahun 2017 dan mencakup Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Posyandu,

perpustakaan anak, tempat bermain dan olahraga anak, dan kegiatan kreatif anak. Namun, bukti menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak telah meningkat di daerah tersebut sejak RPTRA didirikan pada tahun 2015, dan RPTRA Sungai Bambu di Jakarta Utara gagal mencapai tujuan tersebut karena tidak terlaksananya beberapa program, termasuk Posyandu dan BKB-PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa RPTRA belum seefektif yang seharusnya dalam memastikan hak-hak anak atas martabat manusia ditegakkan.

Untuk memfasilitasi kegiatan dan menjaga fasilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan petugas pengelola RPTRA. Namun, di RPTRA Bogasari dan RPTRA Sungai Bambu, misalnya, para pengguna sering merusak fasilitas yang ada, termasuk pagar, lapangan futsal, tanaman, dan perpustakaan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghentikan vandalisme dan menjamin bahwa RPTRA dapat berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang positif bagi semua orang, termasuk anak-anak.



Gambar 1.1 Rusaknya Fasilitas RPTRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak untuk

mengakses fasilitas untuk berkreasi dan berekreasi, keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah memenuhi indikator pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, RPTRA memberikan akses kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bermain dan belajar di tempat yang sebelumnya tidak dapat diakses dengan menyediakan fasilitas bagi anak-anak yang tinggal di daerah kumuh. Selain itu, sektor swasta juga berkontribusi dalam pembangunan RPTRA melalui pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mendorong komunitas perusahaan untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak, yang sejalan dengan persyaratan kota yang memenuhi hak-hak anak. Melalui perjanjian kerja sama yang mengatur bantuan non-fisik dan fisik serta pelibatan masyarakat secara aktif, TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, dan CSR bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara RPTRA.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Utara antara tahun 2015 hingga 2023, dengan mempertimbangkan RPTRA percontohan yang dibangun di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. RPTRA yang memiliki luas sekitar 3838,68 m² dan terletak di wilayah padat penduduk ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan tanggap darurat, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ruang terbuka. RPTRA ini merupakan contoh penting dalam pembangunan fasilitas publik yang ramah anak di Jakarta Utara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap kelompok sasaran yang terjadi di Jakarta Utara
2. Ketidaksesuaian layanan kegiatan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017.
3. Ketidaksesuaian kondisi fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di RPTRA Sungai Bambu
4. Ketidaksesuaian efektifitas pengawasan organisasi pelaksana pada Program RPTRA Sungai Bambu

1.3 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara ?
- 2) Bagaimana Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara ?
- 3) Bagaimana Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan Organisasi Pelaksana di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara?
- 4) Apakah kendala pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian ini diantaranya:

- 1) Menganalisis Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Menganalisis Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 3) Menganalisis Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan Organisasi Pelaksana di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 4) Menganalisis kendala yang ada pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini, khususnya:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman kita mengenai ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan publik dalam menjalankan program-program pemerintah, dan memperkuat teori-teori yang sudah ada saat ini untuk memperkuat penemuan-penemuan baru.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan

publik. Lebih jauh lagi, dapat membantu pengelola RPTRA di tingkat kota administratif dan provinsi dalam menjadikannya sebagai salah satu inisiatif pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan berdampak pada masyarakat yang lebih luas.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur yang berisi kumpulan konsep teoritis yang bersifat abstrak dari tokoh-tokoh tertentu. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar utama yang membantu peneliti dalam merancang penelitian mereka dan membangun jawaban yang terstruktur dan bertanggung jawab terhadap fenomena tertentu.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Selain membantu membingkai penelitian dan menunjukkan keunikannya, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan dan memotivasi penelitian berikutnya. Berbagai temuan penelitian yang relevan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, disertakan dalam bagian ini bersama dengan ringkasan hasilnya. Karena peneliti ingin menyelidiki bagaimana RPTRA Sungai Bambu, sebagai proyek percontohan, dapat menegakkan hak-hak anak dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar, maka kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, menjadi topik yang menarik.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Fitri, U. A., & Kusuma, R. P. (2017).	Studi ini mengkaji analisis kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan menggunakan kerangka kerja SDG poin 11.	1) Kebijakan Publik 2) Pembangunan Berkelanjutan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan RPTRA berpengaruh terhadap SDGs 11.7 karena RPTRA dapat meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat dan Kota Jakarta dengan RPTRA walaupun tidak secara signifikan meningkatkan persentase ruang publik di Jakarta. Berdasarkan peraturan RPTRA no. 196 Pembangunan RPTRA 2015 juga melibatkan aktor lain di sektor swasta dan publik.
2	Pramularso, E. Y., & Marginingsih, R. (2020).	Di RPTRA Kebon Pala Berseri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan dipengaruhi oleh bukti langsung, keandalan, daya	1) Pelayanan Publik 2) Kebijakan Publik	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti langsung, keandalan, dan daya tanggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan jaminan dan empati memiliki dampak yang signifikan.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		tanggap, jaminan, dan empati.			
3	Septiani, T. D. (2020).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemajuan program dan hasil evaluasi RPTRA Anggrek Bintaro.	1) Evaluasi Program 2) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa program RPTRA telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan pemeriksaan konteks, masukan, proses, dan hasil. Hal ini dikarenakan anak-anak yang terpapar dengan RPTRA Anggrek telah merasakan dampaknya.
4	Abdurrahman & Suriyani, E. (2022).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dalam rangka pengentasan permukiman kumuh.	1) Kesesuaian	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, diklasifikasikan sebagai “terlaksana” karena telah memenuhi persyaratan elemen program, pelaksana program, dan kelompok sasaran penerima manfaat..

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
5	Rusmiati. (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses difusi inovasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin dalam membentuk generasi yang berkualitas.	1) Kesesuaian	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan program Generasi Berencana ini merupakan program yang ditujukan untuk remaja dan keluarga yang memiliki remaja. Pemanfaatan dari program ini banyak sekali membuat perubahan dalam kualitas penduduk yang ada di Indonesia ini yang di bentuk dalam pusat informasi konseling remaja (PIK-R) dan Bina keluarga remaja (BKR).
6	Thinnakorn, R., & Kimnuan, P. (2022).	Dalam rangka mengembangkan elemen atau faktor baru yang mempengaruhi gaya Thailand dalam pemanfaatan ruang publik, penelitian ini mencoba untuk menentukan faktor karakteristik yang mempengaruhi pemanfaatan ruang	1) Ruang Publik	Kualitatif	Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan kontekstual dan identitas spasial, fitur lanskap, dan estetika penggunaan ruang publik merupakan karakteristik baru yang mempengaruhi penggunaan ruang publik bergaya Thailand.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		publik gaya Thailand dengan menggunakan kombinasi variabel karakteristik ruang publik yang baik berdasarkan teori Thailand dan teori Barat dari sudut pandang pengguna aktual.			
7	Pitsikali, A., Parnell, R., & McIntyre, L. (2020).	Dengan meneliti fenomena sosio-spasial taman bermain, penelitian ini berusaha untuk menentukan seberapa besar taman bermain membantu anak-anak berintegrasi ke dalam ruang publik dan memungkinkan analisis kritis terhadap	1) <i>Sustainable Urbanism</i> 2) <i>Place Making</i>	Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan persepsi seputar aspek perlindungan dan usia khusus dari desain ramah anak, membatasi nilai publik taman bermain. Namun, sebuah paradoks muncul di mana taman bermain yang berdekatan dengan ruang publik yang dirancang tanpa prinsip ramah anak memungkinkan keterlibatan anak-anak dengan ranah publik.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		gagasan “ruang ramah anak”.			
8	Saragih, J. B., & Subroto, T. Y. W. (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi siswa perempuan dalam mengatasi dominasi laki-laki (ditunjukkan oleh teman sebaya atau pemimpin yang tidak terlihat) di taman bermain sekolah.	1) Kesetaraan Gender 2) Inklusi 3) Interseksionalitas 4) Ruang Publik	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melawan dominasi laki-laki dan pemimpin yang tidak terlihat, siswa perempuan menggunakan tiga strategi yang bergantung pada pola perilaku: mereka memanfaatkan waktu bermain yang terpisah, memanfaatkan taman bermain lain, dan bermain dalam kawanan. Berada dalam kawanan adalah strategi ideal untuk mengatasi kecemasan yang mereka alami; itu adalah adaptasi melalui penyesuaian.
9	Prakoso, S., & Dewi, J. (2018).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana warga, termasuk anak-anak, menggunakan RPTRA dan apakah anak-anak menganggap RPTRA sebagai salah	1) Partisipasi Anak 2) Perkembangan anak 3) Lingkungan Sosial	Kuantitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak terutama menggunakan RPTRA untuk bermain dan belajar, sementara perempuan dan remaja putri paling banyak menggunakan RPTRA dan lansia paling sedikit.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		satu tempat favorit mereka.			
10	Wiguna, D. H., & Salim, T. A. (2018).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan strategi yang digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), khususnya perpustakaan RPTRA.	1) Pendidikan Inklusif 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak 3) Pengembangan Masyarakat Berbasis Pendidikan	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa memiliki perpustakaan di RPTRA merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Dengan adanya perpustakaan tersebut masyarakat terutama anak-anak merasa difasilitasi dalam membaca baik buku - buku akademik, komik, maupun lainnya.

Sumber : Diolah dari berbagai jurnal, 2024

Untuk mengetahui perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti melihat Tabel 1.3. Penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan penulis teliti berbeda dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Perbedaan pada penelitian sebelumnya terdapat pada fokus, lokus dan subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Lokus penelitian dilakukan di RPTRA Sungai Bambu, Kota Administrasi Jakarta Utara. Subjek penelitian terdiri dari pihak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Lurah Sungai Bambu, pihak penanggung jawab RPTRA Sungai Bambu, pengunjung RPTRA Sungai Bambu, dan masyarakat sekitar RPTRA Sungai Bambu.
- 2) Metode dan teori yang digunakan berbeda: studi yang akan dikaji penulis menggunakan model Implementasi Merilee S. Grindle dan Kesesuaian oleh Korten. Merilee S. Grindle dalam model mereka, memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis kendala yang memengaruhi kesesuaian implementasi kebijakan atau program. Dalam konteks RPTRA, teori ini relevan karena fokusnya pada *content of policy* dan *context of implementation* dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan terkait RPTRA diterapkan, sedangkan Teori Kesesuaian Korten sangat relevan dalam konteks implementasi kebijakan karena fokusnya pada bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kondisi yang berbeda-beda. Teori Kesesuaian oleh Korten juga menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Dalam konteks ruang publik ramah anak, ini berarti

kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak di Kelurahan Sungai Bambu, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

1.6.2 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik, seperti yang didefinisikan oleh Chandler dan Plano (1988), adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya publik untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Seni dan ilmu pengetahuan untuk mengelola urusan publik dan menyelesaikan masalah di masyarakat, khususnya di bidang organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, digabungkan dalam administrasi publik.

Di sisi lain, administrasi adalah proses dinamis yang berusaha mencapai tujuan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya material dan manusia melalui kolaborasi dan koordinasi, menurut Tracker dalam Donovan dan Jackson (1991) dan Keban (2008). Tugas utama administrasi meliputi identifikasi kebutuhan, redefinisi, interpretasi, serta pemanfaatan tujuan organisasi sebagai dasar dalam penyelenggaraan program dan layanan. Selain itu, administrasi juga mencakup pengelolaan sumber daya keuangan, fasilitas, tenaga kerja, serta berbagai bentuk dukungan lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah sekumpulan tugas yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik. Administrasi ini dipandang sebagai kombinasi antara ilmu dan seni yang bertujuan untuk bekerja sama dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam buku *Handbook of Public Administration* karya James L. Perry, yang dikutip oleh Rodiyah, Isnaini, dkk. (2021), terdapat beberapa aspek penting dalam lingkup Administrasi Publik, yaitu:

- 1) Tantangan yang dihadapi dalam administrasi publik serta bagaimana cara menyesuaikan diri dengan perubahan.
- 2) Menerapkan struktur organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien.
- 3) Upaya untuk meningkatkan hubungan administrasi publik dengan pihak berwenang yang dipilih atau ditunjuk, badan legislatif, dan masyarakat umum.
- 4) Teknik-teknik untuk membuat program dan kebijakan yang akan berhasil diimplementasikan.
- 5) Penganggaran dan perpajakan yang efisien.
- 6) Manajemen sumber daya manusia sektor publik.
- 7) Peningkatan efektivitas operasional dan layanan publik.
- 8) Penerapan praktik administrasi publik yang profesional dan berlandaskan etika.

Penelitian mengenai Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, diharapkan dapat memajukan bidang studi administrasi publik secara signifikan. Selain mengungkap bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal, penelitian ini juga menyoroti kesulitan dan pencapaian yang dihadapi selama proses tersebut. Para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dapat menggunakan temuan-temuan ini sebagai

panduan untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berhasil, terutama dalam hal menciptakan area terbuka hijau bagi anak.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma dapat diartikan sebagai sudut pandang, nilai-nilai, metode, serta prinsip mendasar yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Menurut Nicholas Henry, sebagaimana dikutip oleh Rodiyah, Isnaini, dkk. (2021), terdapat lima paradigma utama dalam ilmu administrasi publik, yang dijelaskan, yakni:

Paradigma pertama (1900-1926) memisahkan politik dan administrasi publik, dengan tokoh utama seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang berpendapat bahwa politik fokus pada kebijakan, sementara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebagai entitas netral yang mengutamakan efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Paradigma kedua (1927-1937) menekankan prinsip-prinsip dasar administrasi publik, yang dikenalkan oleh tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang terinspirasi oleh manajemen klasik. Mereka memperkenalkan konsep POSDCORB yang dianggap universal dalam pengelolaan organisasi.

Paradigma ketiga (1950-1970) melihat administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik, dengan tokoh seperti Morstein-Marx yang menyatakan hubungan antara politik dan administrasi yang tak terpisahkan. Paradigma keempat (1956-1970) mengarah pada administrasi publik yang lebih sistematis, fokus pada perilaku organisasi, manajemen, dan penerapan teknologi modern. Paradigma kelima (1970-

1990) lebih menitikberatkan pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik, sementara paradigma keenam (1990-sekarang), yang dikenal dengan paradigma Governance, menekankan pada mekanisme tata kelola sumber daya dan penyelesaian masalah publik, serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma kelima, yang berfokus pada teori organisasi dan manajemen publik, sesuai dengan studi tentang Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara.

1.6.4 Kebijakan Publik

Chandler dan Plano (1988:107) mendefinisikan kebijakan publik sebagai penggunaan sumber daya yang disengaja untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan dan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah demi kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang lemah, sehingga mereka dapat hidup dan terlibat dalam proses politik. Kebijakan publik, menurut definisi ini, adalah setiap kegiatan pemerintah yang mempertimbangkan kepentingan publik, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan tujuan utama adalah kepentingan publik. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu langkah dalam proses yang disebutkan oleh William Dunn (dalam Anggara, 2014: 120-121). William Dunn (dalam Anggara, 2014: 120-121) mengemukakan bahwa empat tahapan dalam pembuatan kebijakan publik:

- 1) Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan penyusunan agenda, yang memerlukan pengolahan dan analisis berbagai masalah publik untuk menentukan masalah mana yang akan diprioritaskan dalam agenda kebijakan.

- 2) Perumusan kebijakan, di mana para pembuat kebijakan berdiskusi dan mencoba mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut.
- 3) Implementasi, yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang nyata.
- 4) Evaluasi, yang diperlukan untuk mengetahui substansi, implementasi, dan dampak dari kebijakan tersebut.

Penelitian Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Utara akan melihat bagaimana kebijakan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat implementasi di lapangan dari kebijakan yang dikembangkan dan apakah telah mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan tersebut.

1.6.5 Implementasi Program

Jones menegaskan bahwa pelaksanaan program merupakan komponen penting dari kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Arif Rohman, 2009). Menurut Charles O. Jones (dalam Siti Erna Latifi Suryana, 2009), ada tiga pilar utama yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Pertama, struktur organisasi yang jelas dan keterlibatan personil yang berkualitas untuk menjalankan program; kedua, pelaksana program harus mematuhi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar dapat mencapai tujuan; dan ketiga, prosedur kerja yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa program beroperasi sesuai jadwal dan tidak bertentangan dengan program lain. Agar program dapat diimplementasikan dengan baik, program harus disusun, dikelola, diterapkan, dan sesuai prosedur.

1.6.6 Model Implementasi

1.6.6.1 Model George Edwards III

Subarsono (2005) mengutip George C. Edwards III yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1) Komunikasi

Menjamin bahwa para pelaksana dan kelompok sasaran memahami tujuan dan sasaran kebijakan untuk mencegah terjadinya distorsi.

2) Sumber Daya

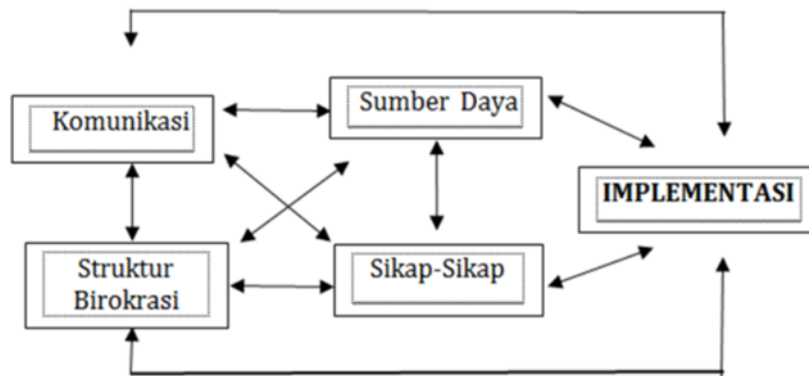
Terdiri dari sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan cara yang efisien.

3) Disposisi

Mengacu pada sifat-sifat pelaksana yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti dedikasi dan pandangan demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Di mana prosedur operasi standar (SOP) berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana.



Gambar 1.2 Variabel Implementasi Kebijakan
Sumber : George Edwards III (Winarno, 2007:28)

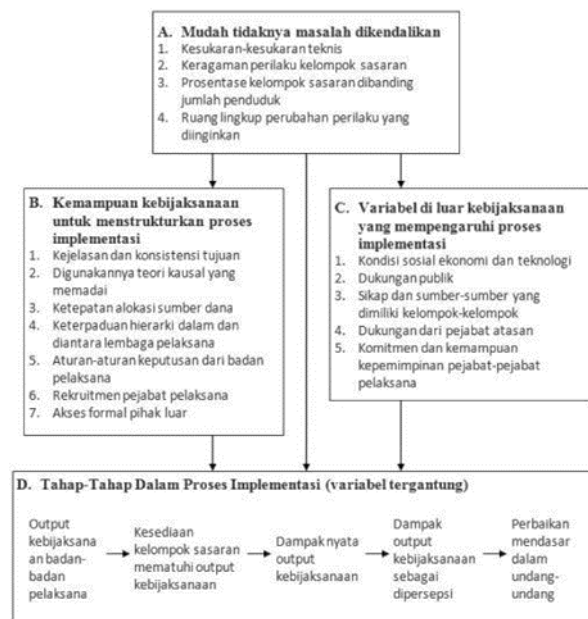
Model ini menyoroti betapa pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan lingkungannya dan memastikan bahwa para pelaksana menyadari tanggung jawab mereka untuk memperoleh sasaran kebijakan.

1.6.6.2 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menentukan elemen-elemen yang dapat berdampak pada perolehan tujuan formal dalam proses implementasi merupakan komponen penting dalam analisis implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok atau kategori, secara khusus:

- 1) Tingkat kemudahan dalam mengatasi permasalahan.
- 2) Kapabilitas kebijakan dalam mengorganisasikan jalannya pelaksanaan
- 3) Cara berbagai faktor politik yang berbeda secara langsung mempengaruhi proporsi orang yang mendukung tujuan yang digariskan dalam kebijakan.

**HUBUNGAN ANTAR VARIABEL IMPLEMENTASI
MODEL MAZMANIAN DAN SABATIER**



Gambar 1.3 Variabel-Variabel Proses Implementasi Kebijakan

Sumber : Suparno (2007 :40)

1.6.6.3 Model Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal sebagai “implementasi sebagai proses politik dan administrasi” diperkenalkan oleh Grindle, dan pendekatan ini mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan melalui dua faktor utama:

- a. Dari sisi proses: Mengkaji apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai dengan desain awal dan tindakan yang direncanakan.
- b. Dalam hal tujuan: Mengevaluasi apakah tujuan kebijakan telah tercapai, dengan mempertimbangkan tingkat perubahan yang terjadi, pengaruhnya terhadap orang dan kelompok masyarakat, dan penerimaan kelompok sasaran.

Tingkat implementabilitas kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari dua komponen utama, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik:

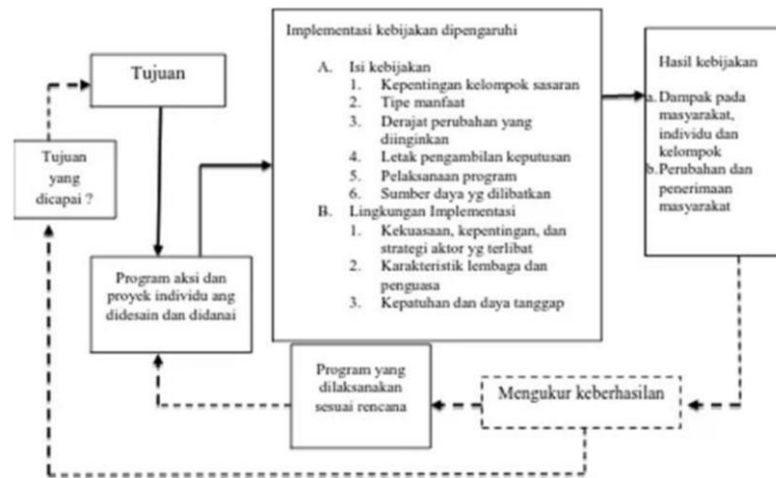
a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. *Interest Effected*
2. *Type of Benefits*
3. *Extent of Change Envision*
4. *Site of Decision Making*
5. *Program Implementer*
6. *Resources Committed*

b. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*
2. *Institution and Regime Characteristic*
3. *Compliance and Responsiveness.*

Model implementasi kebijakan Grindle ini digunakan untuk mengkaji beragam isu yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada proses administratif dan politik yang menyertainya.



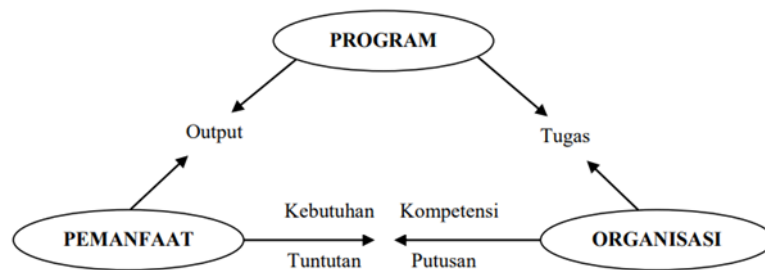
Gambar 1.4 Model Implementasi Grindle

Sumber : Merilee Grindle, (1980: 11)

1.6.6.4 Model Korten

Jika ketiga persyaratan implementasi program terpenuhi, maka program tersebut dikatakan berhasil dilaksanakan (Korten, 1988: 241).

1. Kesesuaian program-penerima manfaat mengacu pada seberapa baik penawaran program sesuai dengan kebutuhan populasi sasaran (penerima manfaat).
2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, atau kesesuaian antara tugas-tugas program dan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok sasaran, program dan organisasi pelaksana, atau lebih tepatnya, keselarasan antara kemampuan kelompok sasaran dengan penilaian organisasi terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai hasil program.



Gambar 1.5 Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber : David C. Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2008: 12)

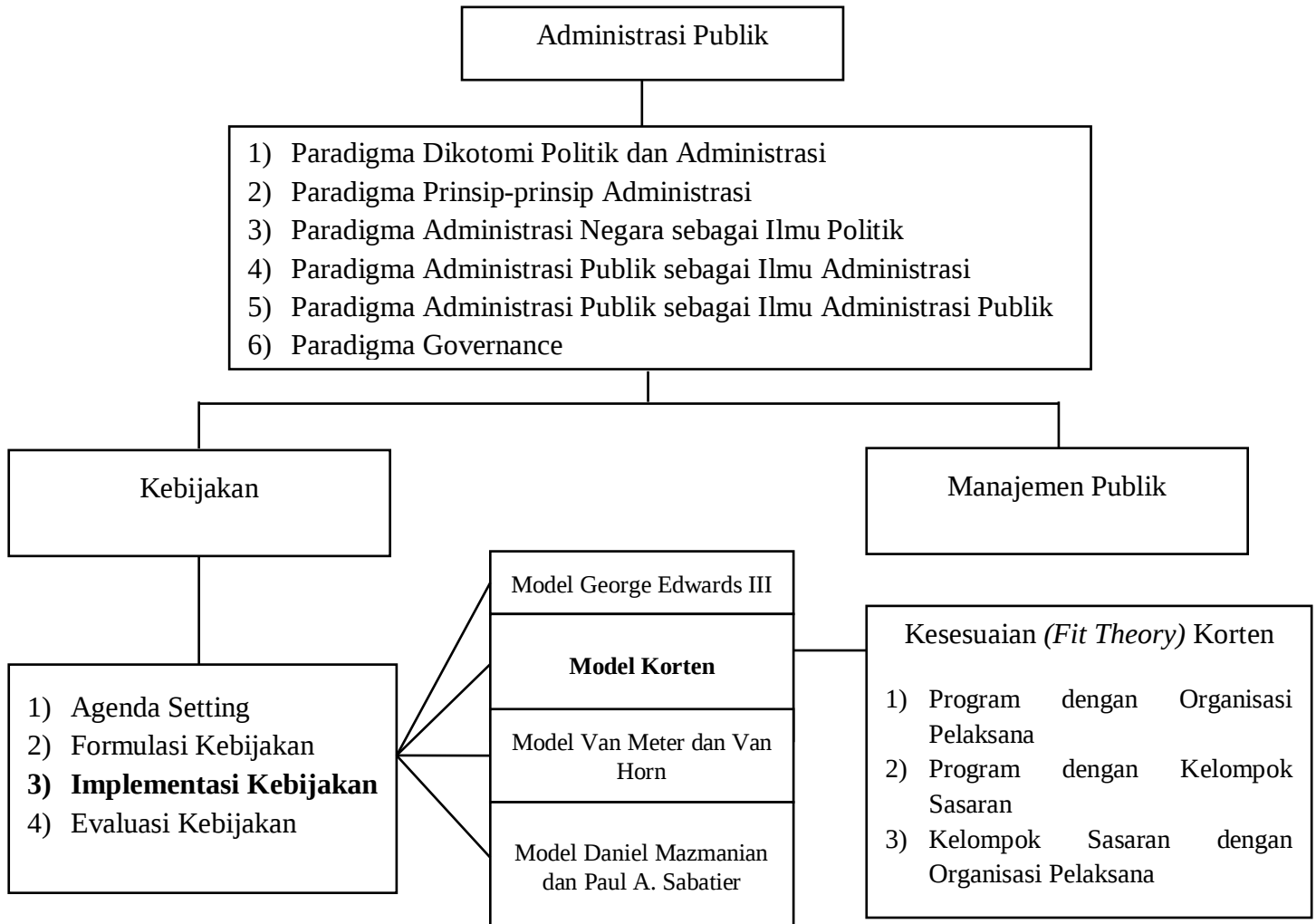
Agar program dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Korten (1988) menegaskan bahwa tiga komponen implementasi kebijakan haruslah kompatibel. Ketiga komponen tersebut adalah program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Program tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan jika output tidak memenuhi tuntutan populasi sasaran atau apabila organisasi pelaksana kekurangan kapasitas yang sesuai. Kapabilitas program untuk berfungsi secara efisien dan memberikan manfaat yang tepat dijamin oleh keselarasan komponen-komponen ini. Dengan menyoroti pentingnya kesesuaian antara domain substansi kebijakan, konteks implementasi, dan hasil yang diharapkan, model kesesuaian ini memperkuat model-model implementasi kebijakan lainnya.

Persamaan antara keempat model ini terletak pada pengakuan bahwa implementasi kebijakan adalah Proses yang multi-dimensi dan mencakup berbagai faktor yang saling mendukung. Setiap model mengakui bahwa rancangan kebijakan itu sendiri bukanlah satu-satunya elemen yang menentukan keberhasilannya, variabel internal dan eksternal yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan juga berperan.

Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan masing-masing model. Edwards III lebih menekankan pada aspek birokratis dan operasional, Mazmanian & Sabatier lebih fokus pada karakteristik masalah dan lingkungan implementasi, sedangkan Van Meter & Van Horn lebih menekankan pada interaksi dan proses dinamis antar aktor. Model Korten menekankan pada pengaruh organisasi dan kekuatan aktor dalam proses implementasi, serta pentingnya hubungan vertikal dan horizontal dalam pelaksanaan. Meskipun demikian, keempat model tersebut memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami berbagai aspek dalam implementasi kebijakan publik.

Dari keempat model teori implementasi tersebut, pada penelitian Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara penulis menggunakan teori Korten dan Grindle sebagai kerangka konseptual yang saling melengkapi guna menjawab rumusan masalah penelitian. Korten menyoroti hubungan internal antara kelompok sasaran, program, dan organisasi pelaksana, sedangkan Grindle menambahkan analisis eksternal berupa hambatan dan peluang dalam implementasi. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana RPTRA diimplementasikan, sejauh mana kesesuaian elemen-elemen kuncinya, serta kendala yang dihadapi. Analisis ini juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki implementasi program RPTRA di masa depan.

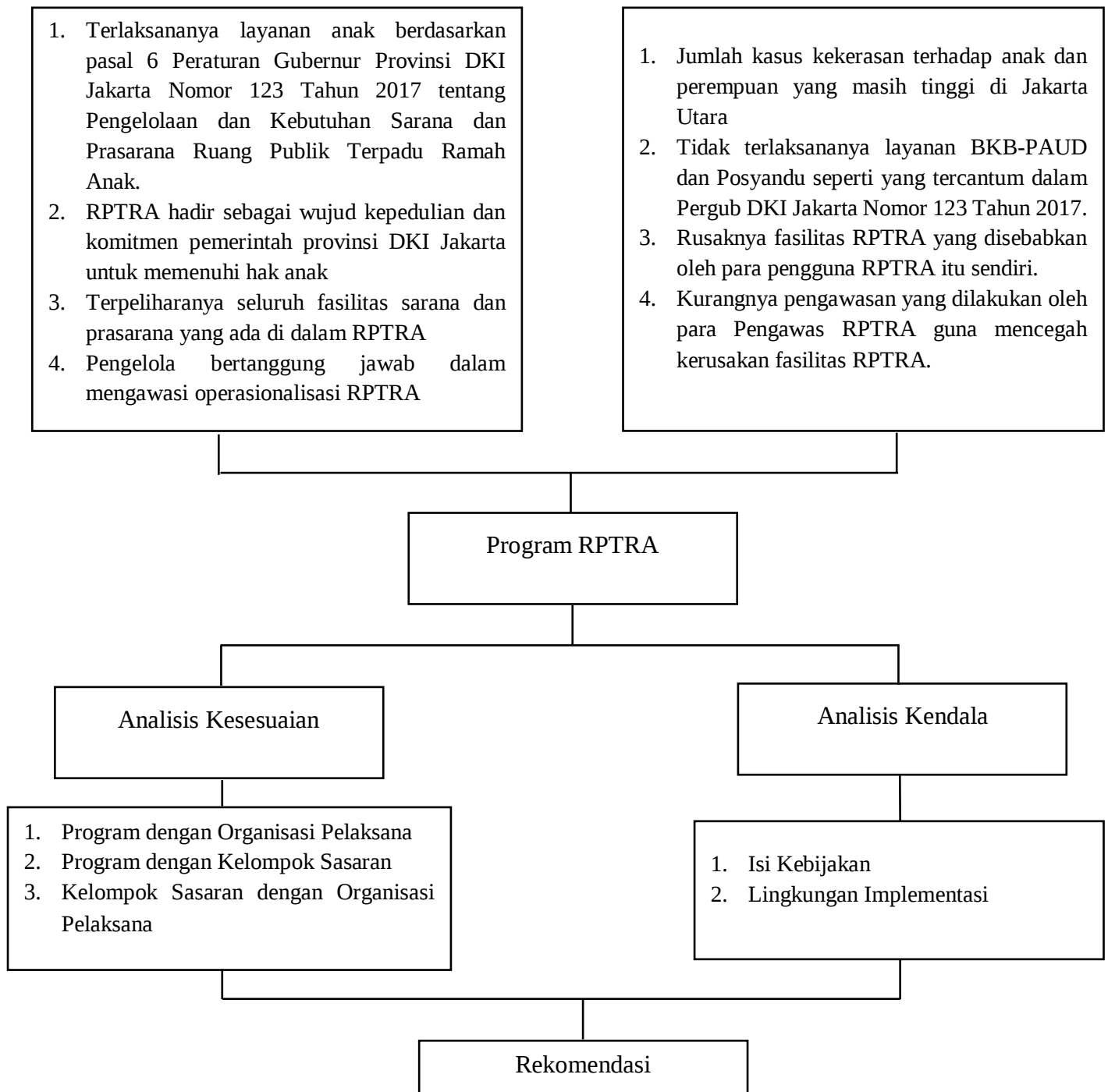
1.6.7 Kerangka Pikir Teori



Gambar 1.6 Kerangka Pikir Teori

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

1.8 Operasionalisasi Konsep

Agar gagasan atau ide abstrak dapat dikenali, diamati, dan diperiksa dalam penelitian, gagasan atau ide tersebut harus dioperasionalkan, yaitu, diubah menjadi bentuk yang nyata dan dapat diukur. Proses ini melibatkan penentuan indikator-indikator yang mewakili konsep, serta alat atau metode yang akan digunakan untuk mengukur indikator tersebut. Dalam penelitian Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara, peneliti menggunakan Teori Kesesuaian oleh Korten dan Teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle.

1. Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana. Kriteria kesesuaian yang akan dianalisis, yaitu :
 - a) Kesesuaian Tujuan Program dengan Kebutuhan Sasaran
 - b) Kesesuaian Proses Pelaksanaan
 - c) Kesesuaian Dampak Program
2. Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran. Kriteria kesesuaian yang akan dianalisis, yaitu :
 - a) Kesesuaian Tujuan dengan Sasaran
 - b) Kesesuaian Kegiatan dengan Sasaran
 - c) Kesesuaian Fasilitas dengan Kebutuhan Sasaran
 - d) Kesesuaian Dampak Program
3. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana
 - a) Kesesuaian Tujuan Program dengan Pelaksanaan
 - b) Efektivitas Pelaksanaan Program

- c) Keterlibatan Masyarakat
 - d) Keberlanjutan Program
4. Analisis Kendala
- a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*)
 - b) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

1.9 Fenomena Penelitian

Penerapan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan hal yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti juga meneliti elemen-elemen yang mendorong dan menghambat penerapan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan cara ini, akan dapat mengatasi masalah atau tantangan yang muncul selama pengoperasian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kota Administrasi Jakarta Utara.

Tabel 1.5 Fenomena Penelitian

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana pada Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.	Hubungan dan sinergi antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran	1) Ketersediaan Jumlah Pengelola 2) Kompetensi Pengelola 3) Sistem Perekrutan 4) Ketersediaan Tenaga Pengajar/Pelatih 5) Peran Kelompok Sasaran

Fokus	Fenomena	Sub Fenomena
Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.	Tingkat keterlibatan dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran	1) Kesesuaian kebutuhan kelompok sasaran 2) Kesesuaian layanan kegiatan anak 3) Dampak program 4) Keberhasilan Program
Pelaksana dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.	Keterlibatan organisasi pelaksana dalam pengelolaan dan pelaksanaan program	1) Pelaksanaan Layanan Kegiatan 2) Partisipasi kelompok sasaran 3) Sarana dan prasarana 4) Respon pelaksana 5) Sumber daya anggaran
Kendala pada Program RPTRA di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara	Dukungan lingkungan dan kebijakan yang berlaku	1) Respon Masyarakat 2) Kebijakan yang mendasari

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian peneliti menggambarkan penerapan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, dengan menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Selain itu menggunakan data

dan analisis terkait dari para pemangku kepentingan terkait untuk mengkarakterisasi pelaksanaan program dengan menggunakan teori implementasi dan teori kesesuaian.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan yang memiliki konsentrasi penduduk miskin dan pemukiman terpadat di DKI Jakarta. Studi ini berfokus pada Kesesuaian Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu untuk memahami penggunaan dan program ruang publik yang ramah anak di wilayah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan area bermain anak yang terbatas.

1.10.3 Subjek Penelitian

Peneliti menerapkan teknik purposive sampling guna memperoleh subjek penelitian, yaitu masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang berpartisipasi dalam Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan menggunakan pendekatan ini, informasi mengenai penerapan program RPTRA ditelusuri untuk mendapatkan sampel representatif yang memenuhi persyaratan topik penelitian.

Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti menggunakan tiga informan kunci sebagai berikut:

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Sungai Bambu
- 3) Sekretaris Tim Pengelola RPTRA Sungai Bambu

Peneliti memilih tiga informan kunci tersebut karena informan di atas mengerti terhadap Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif Jakarta Utara yang nantinya dapat menunjang penelitian ini. Adapun informasi pendukung menggunakan dua informan sebagai berikut:

- 1) Pengunjung RPTRA Sungai Bambu
- 2) Masyarakat setempat

Dipilihnya informan tersebut diharapkan mampu mendukung kelengkapan pada penelitian ini

1.10.4 Jenis Data

Kata-kata, materi tertulis, gambar, dan sumber data lainnya seperti dokumen tertulis merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif (Lofland dan Lofland, 1984:47). Mereka menekankan bahwa berikut ini adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif:

1. Kata-kata

Data pokok yang akan digunakan pada penelitian adalah informasi yang bersumber dari percakapan dengan informan yang diamati. Informasi tersebut biasanya direkam dan didokumentasikan melalui pengambilan gambar atau rekaman suara.

2. Sumber tertulis

Sumber data selanjutnya yang tidak kalah pentingnya harus diperhatikan adalah ragam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, catatan pribadi, arsip, dan dokumen resmi.

3. Foto

Baik gambar peneliti sendiri maupun gambar orang lain dapat digunakan dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982: 102).

1.10.5 Sumber Data

Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap informan digunakan untuk mengumpulkan data primer. Sumber data sekunder mencakup tinjauan literatur, dokumen pemerintah, media, dan karya akademis lainnya tentang kebijakan dan program ruang publik.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memfasilitasi dan menghambat pelaksanaan program, fenomena-fenomena tersebut diamati secara langsung di RPTRA Sungai Bambu di Jakarta Utara. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan, seperti pengelola RPTRA dan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan wawancara semi-terstruktur. Informasi dari teks, gambar, atau dokumen yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Tindakan mengatur, mengklasifikasikan, dan mensintesis data untuk mengidentifikasi pola yang signifikan dan relevan dikenal sebagai analisis data

kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data meliputi menyeleksi, memfokuskan, mengabstraksikan, serta menyederhanakan data untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti uraian atau dokumen. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis, menghubungkan elemen-elemen penting dengan konteks sosial, dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil mencakup semua aspek yang relevan.

1.10.8 Kualitas Data atau Validasi Data

Prosedur triangulasi, yang mencakup pemeriksaan data dengan berbagai cara dan pada periode yang berbeda, digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keaslian data. Triangulasi sumber, yang memverifikasi keakuratan data dari beberapa sumber yang saling berhubungan, dan triangulasi teknik, yang membandingkan temuan observasi, wawancara, dan dokumentasi, adalah dua contoh teknik triangulasi yang digunakan. Selain itu, member check digunakan untuk melakukan pengujian keabsahan data, yang mencoba mengkonfirmasi keabsahan dan kepercayaan data yang dikumpulkan serta kesesuaian data dengan informasi yang diberikan oleh para informan.